

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT
SUB UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI WAHYUNINGSIH**
2. Jabatan : **PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)**
3. NHK : **713871**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **94.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA SOLUNA GLI MT/AL50 Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA F1C02N28L0 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA E1F02N11M2 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
5. MOTOR, HONDA D1A02N18M1 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **16.091.594**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **410.091.594**

III. HUTANG Rp. **320.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **90.091.594**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.